

Memberdayakan Masyarakat Lewat Penyiaran Berita Bencana Alam

*Ana Nadhya Abrar**)

Abstract

In reporting natural disaster, the press should empower audiences. How the press should shape the news in order to empower audiences? Departure from literatures review, this article suggests several guidelines, namely: (i) pushing audiences thinking creatively; (ii) avoiding “news maker authorities”; (iii) avoiding influence of bureaucrat and foundation institution; (iv) creating discourses carefully; (v) explaining risks after having natural disaster; and (vi) helping audiences define fear feeling correctly.

Kata-kata kunci; *“pejabat pembuat berita”, risiko pasca bencana alam; jurnalisme publik; public sphere; authoriphobia.*

Pendahuluan

Segera setelah bencana alam melanda sebuah daerah, berbagai media pers menyiarkan berita tentang bencana alam tersebut. Masyarakat prihatin. Sebagian dari mereka berduka dan berdoa semoga para korban diberi kekuatan dan ketabahan. Sebagian lagi tergerak membantu para korban. Kemudian mereka melupakan bencana alam itu.

Kejadian di atas berlangsung berkali-kali. Media pers seolah-olah tidak mampu menjadikan masyarakat waspada terhadap bencana alam. Padahal media pers sudah menyajikan pendapat para ahli tentang bagaimana menghindari bencana alam dan apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana alam! Lebih dari itu, media pers juga sudah menyajikan kerugian yang ditimbulkan bencana alam. Tidak heran bila ada pihak yang mempersoalkan kemampuan media pers dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang bencana alam.

Dalam kesempatan lain, masyarakat masih saja heran, mengapa Indonesia sering kali diterpa bencana alam? Padahal media pers sudah menjelaskan gejala alam yang disebut efek rumah kaca yang menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya suhu udara. Media pers juga sudah menjelaskan bahwa penggundulan hutan serta pembangunan rumah di daerah resapan air bisa menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Maka, kita jadi bertanya, apa yang harus dilakukan media pers dalam menyiarkan berita tentang bencana alam agar masyarakat punya kepedulian tentang pencegahan bencana alam?

Di masa medatang, media pers masih akan tetap bersemangat menyiarkan berita tentang bencana alam. Media pers akan terus menyampaikan informasi yang lengkap tentang bencana alam, mulai dari apa yang sesungguhnya terjadi, siapa dan bagaimana korban, dan

*) *Ana Nadhya Abrar* adalah mahasiswa PhD pada Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia bisa dikontak melalui email: ana.abrar@gmail.com atau inyiak_pisang@yahoo.co.id

apa yang sudah dilakukan pemerintah. Media pers akan terus berusaha meyakinkan masyarakat tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam. Tentu kita ingin agar media pers berhasil. Lalu, apa yang bisa kita usulkan kepada media pers dalam konteks memberdayakan masyarakat lewat berita tentang bencana alam?

Mendorong Masyarakat Berpikir Kreatif

Berbeda dengan berita politik, berita bencana alam yang disiarkan media pers tidak memiliki konteks perubahan politik yang terjadi. Ia tidak akan menciptakan gerakan sosial, katakanlah, yang menentang rezim yang berkuasa. Ia bahkan jauh dari niat untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa. Kendati begitu, ia bisa menimbulkan kepanikan moral, semacam kecemasan berkepanjangan yang terjadi pada masyarakat (Hartley 2002:147).

Secara konseptual, kecemasan berkepanjangan bisa terjadi pada masyarakat karena munculnya ancaman dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif ini, ancaman berasal dari pengetahuan, nilai-nilai dan pengalaman yang mereka miliki. Sebuah misal, bertolak dari pengetahuan tentang akibat tsunami di Aceh 26 Desember 2004, ketika gempa melanda Bantul dan sekitarnya 27 Mei 2006, sebagian masyarakat Yogyakarta otomatis berpikir bahwa gempa itu melahirkan tsunami. Mereka panik. Tanpa konfirmasi mereka berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pengetahuan masyarakat tentang gempa yang melahirkan tsunami sebagian besar dibangun oleh media pers. Dengan kata lain, media pers, yang menyiarkan berita bencana alam, bisa menyebabkan munculnya kecemasan yang berkepanjangan dalam masyarakat. Sayangnya, wartawan yang meliput berita tentang gempa yang melanda Bantul dan sekitarnya tersebut tidak punya pengetahuan yang memadai tentang kaitan gempa bumi dan tsunami. Akibatnya, berita yang mereka siarkan tidak sesuai dengan pengetahuan umum tentang sains.¹ Tidak heran bila berita bencana alam yang sampai kepada masyarakat melahirkan kecemasan yang mendalam.

Harus diakui bahwa selama ini berita tentang bencana alam yang sampai kepada masyarakat datang secara bertubi-tubi. Maksud media pers tentu saja baik, agar masyarakat waspada terhadap bahaya bencana alam. Membaca berita berjudul "Akibat Banjir di Tagerang Kerugian Mencapai Rp 308 Milyar", tentu masyarakat Tangerang tidak ingin mengalami banjir lagi. Bukankah jumlah uang sebanyak itu sangat banyak bagi masyarakat? Membaca berita berjudul "18.000 Ha Tanaman Padi Puso Akibat Banjir di Kabupaten Bekasi", tentu para petani di Bekasi tidak ingin ada lagi banjir di Bekasi. Bukankah luas areal sebanyak itu sangat luas?

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa ada dampak negatif pentubian berita tentang bencana alam. Lihatlah, setelah memperoleh informasi tentang gempa Bantul, banyak orangtua-orangtua yang berasal dari luar Yogyakarta yang enggan menyekolahkan anaknya di

¹ Secara umum, wartawan yang meliput bencana alam termasuk wartawan lingkungan hidup. Di Kanada, seperti ditulis Michael Keating, wartawan lingkungan hidup harus belajar tentang sains dan memperoleh pelatihan tentang bagaimana sesungguhnya meliput kejadian, kasus dan fenomena lingkungan hidup (1993:82).

Yogyakarta. Akibatnya, pada Tahun Akademik 2006/2007, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) di Yogyakarta kekurangan mahasiswa. Kalau kejadian ini berlanjut terus, bukan mustahil beberapa PTS di Yogyakarta jadi bangkrut. Bukankah sumber utama pembiayaan PTS berasal dari mahasiswanya?

Banyaknya orangtua yang enggan menyekolahkan anak mereka ke Yogyakarta sesungguhnya merupakan hasil berpikir reaktif. Artinya, mereka bereaksi terhadap bahaya gempa yang terjadi di Bantul. Berpikir reaktif seperti ini, dalam tataran tertentu, bisa dianggap baik. Akan tetapi, untuk menyelesaikan berbagai persoalan, berpikir reaktif tidak cukup. Diperlukan cara berpikir lain, yaitu berpikir kreatif.

Berpikir kreatif, seperti ditulis Aion Mohd dan Abdullah Hassan, adalah berupaya melihat sebuah kejadian dari berbagai sudut pandang (2005:21). Hasilnya, biasanya, berupa berbagai cara untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak heran bila berpikir kreatif melahirkan peluang dalam menyelesaikan masalah.

Persoalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana media pers harus menyiarkan berita tentang bencana alam yang bisa mendorong masyarakat berpikir kreatif? Salah satu cara yang bisa dipakai adalah, memberikan informasi tentang usaha yang harus dilakukan masyarakat untuk mengubah keadaan sekarang. Media pers memberikan alternatif jalan keluar yang bisa ditempuh oleh masyarakat dengan usaha mereka sendiri. Secara teknis, di mana wartawan harus menyisipkan berbagai alternatif jalan keluar tersebut?

Penyisipan keterangan itu bisa di mana saja dalam tubuh berita. Yang penting adalah wartawan perlu memperluas berita tentang bencana alam. Fakta yang dikandung berita tersebut tidak hanya fakta keras tentang *happening* bencana alam—yang menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana dan bilamana—tetapi juga fakta lembut tentang bagaimana masyarakat harus menghadapi bencana alam serta apa yang harus dilakukan masyarakat pasca bencana alam. Dengan formula seperti ini, berita bencana alam yang hanya menyiarkan *happening* tentang bencana tersebut adalah setengah berita. Wartawan harus mencari fakta sebanyak setengah berita lagi. Pada titik inilah sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa berita tentang bencana alam adalah berita yang kompleks.²

Karena kompleksitas berita inilah kemudian Michael Keating mengatakan bahwa para wartawan yang meliput berita tentang bencana alam harus berhati-hati menyiarkan berita tentang bencana alam. “Mereka harus menulis berita dengan akurat dan menjelaskan beberapa risiko dan alternatif kepada masyarakat,” tambah Keating (1993:93).

Menghindari “pejabat pembuat berita”

Sebagian besar bencana alam tergolong kejadian yang tak terduga. Karena itu, media pers memberitakannya setelah kejadian tersebut berlangsung. Dalam memberitakannya, media pers biasanya mengikuti pola yang ajeg, yaitu: (i) laporan awal tentang *happening*, menyiarkan hasil wawancara dengan pihak yang bisa dipercayai tentang akibat yang ditimbulkan,

² Kompleksitas berita tentang bencana alam setara dengan kompleksitas berita tentang lingkungan hidup. Tetapi, masalah lingkungan hidup belum dianggap media pers sebagai masalah penting. Tidak heran bila wartawan lingkungan hidup masih kalah pamor bila dibandingkan dengan wartawan bidang politik.

menyiarkan hasil wawancara dengan saksi; (ii) laporan lanjutan tentang dampak berdasarkan pendapat para pejabat yang dianggap media pers bisa dipercaya; dan (iii) laporan lanjutan lagi tentang apa yang harus dilakukan masyarakat berdasarkan pendapat pejabat yang lebih tinggi lagi, seperti bupati, gubernur, menteri hingga wakil presiden bahkan presiden yang dianggap media pers tidak sedang menebarkan pesona atau membentuk citra positif.

Pemberitaan di atas sudah menjadi rutinitas setiap bencana alam. Kita sudah terbiasa dengan pola berita semacam itu. Begitu terbiasanya, sehingga kita lupa untuk mengkritisnya. Padahal bukan mustahil berita yang dihasilkan pola seperti itu bisa menyesatkan. Salah satu yang mungkin terjadi adalah, “pejabat membuat berita”. Sebuah misal adalah, pejabat menjanjikan “angin surga” kepada korban bencana alam. Ketika sampai saatnya janji itu ditagih, pejabat itu malah pura-pura tidak tahu. Atau pejabat itu mengatakan bahwa perhitungannya meleset.

Kejadian seperti ini akan membuat masyarakat, terutama korban bencana alam, gelisah. Tidak jarang mereka bereaksi negatif terhadap janji gombal tersebut. Bahkan kadang-kadang, tanpa sadar, mereka menghujat pejabat bersangkutan dengan mengatakan bahwa mereka pendusta. Mereka seolah-olah lupa bahwa sebenarnya masih bisa dipikirkan lagi jalan ke luar untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Bila dilihat secara saksama, tujuan utama pejabat berbicara tentang bencana alam adalah untuk memberikan dukungan moral kepada para korban untuk tetap tabah. Dalam memberikan dukungan tersebut, kadang-kadang, mereka berdusta.³ Dusta pun seolah-olah sudah menjadi bagian dari kebudayaan pejabat. Tentu saja sikap ini tidak bijaksana.

Sekalipun tujuan pejabat di atas memberikan dukung moral, di balik itu terdapat tujuan tersembunyi, yaitu memperoleh citra positif. Citra positif ini meliputi: merupakan pejabat yang peduli dengan penderitaan masyarakat, menjadi pejabat pertama yang tiba di lokasi kejadian, sebagai pejabat yang bersedia merasakan penderitaan masyarakat dan sebagainya. Dengan citra semacam itu, popularitasnya tetap terpelihara. Kalau sudah begini, maka terbuka kesempatan baginya untuk melanggengkan jabatan yang disandangnya. Media pers pun bisa disebut diperalat sang pejabat untuk menggapai tujuannya. Pada titik inilah media pers disebut tidak lagi menjadi alat profesional untuk melayani kepentingan publik.

Mengamati berita bencana tentang bencana alam selama ini, agaknya kita masih perlu untuk mengingatkan media pers untuk tidak menjadi corong pejabat. Bersamaan dengan itu kita juga agaknya perlu mengingatkan media pers agar menyajikan informasi secara independen kepada masyarakat. Dengan informasi seperti ini, seperti ditulis William F Woo, masyarakat bisa mengambil keputusan yang cocok untuk diri mereka (Dalam Veronica, 2006:18).

Agar media pers tidak menjadi corong sang pejabat model di atas, mereka harus menyeleksi pejabat yang akan diminta keterangan tentang sebuah bencana alam. Sudah begitu, keterangan yang berasal dari dirinya harus diseleksi dengan ketat. Pada saat menyeleksi ini, menurut Michael Keating, wartawan harus melihat posisi pejabat sebagai pihak yang

³ Dusta, menurut Jakob Sumardjo, adalah ekspresi palsu, baik dalam ucapan maupun tindakan (1997:73). Bila ada seorang pejabat berdusta, maka sesungguhnya dia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui atau pikirkan. Karena itu, pejabat seperti ini tidak pantas menjadi pejabat.

independen (1993:84). Artinya, sang pejabat harus tidak punya agenda tersembunyi dalam menyampaikan pendapatnya tentang bencana alam yang sudah terjadi.

Akan tetapi, tidak berarti media pers harus menghindari pejabat dalam menyiapkan berita tentang bencana alam. Pejabat, harus diakui, punya akses terhadap berbagai lembaga yang bisa memberikan bantuan. Pejabat juga memiliki akses terhadap informasi yang bisa dipakai sebagai dugaan awal penyebab terjadinya bencana alam. Pejabat bahkan bisa mengerahkan sumber dayanya untuk segera menyiapkan rencana evakuasi korban bencana alam. Karena itu, pejabat memang dibutuhkan media pers sebagai narasumber. Yang harus dihindari adalah, pejabat yang sudi berdusta demi memperoleh citra positif masyarakat.

Dalam konteks ini, media pers tidak boleh meluncur pada *authoriphobia*, takut berlebihan pada pejabat. Kondisi seperti ini, seperti ditulis Rachmah Ida, akan menjadikan media pers resisten terhadap pejabat (2007:7). Kalau ini yang terjadi, maka media pers selalu ingin menghindar dari pejabat. Media pers bahkan ingin melupakan pejabat sebagai narasumber yang penting. Sikap ini, sesungguhnya, akan merugikan media pers sendiri.

Yang juga harus dihindari oleh para wartawan adalah fanatisme mengutip pembicaraan narasumber.⁴ Fanatisme ini, di samping akan memperlihatkan ketidakmampuan wartawan, juga menjatuhkan media pers yang menyiarkan berita bencana alam. Betapa tidak, ketika seorang wartawan hanya mengutip informasi yang disampaikan narasumber, orang akan menilai bahwa dia tidak mempunyai rasa ingin tahu (*curiosity*) yang besar tentang bencana alam yang dia laporkan. Dia akan dianggap mencukupkan saja informasi yang berasal dari narasumber. Lebih dari itu, dia akan dianggap tidak punya keinginan untuk memverifikasi informasi yang dia peroleh dari narasumber. Padahal usaha verifikasi informasi, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, merupakan elemen ketiga jurnalisme. "Usaha memverifikasi informasi yang dilakukan wartawanlah yang membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi dan seni," tambah mereka (2001:71).

Fanatisme mengutip pembicaraan narasumber juga mengabaikan masyarakat. Kepuasan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang bencana alam tidak terpenuhi. Lebih dari itu, masyarakat tidak memperoleh informasi yang lengkap tentang bencana alam yang diberitakan. Lalu, bagaimana mungkin berita tentang bencana alam bisa memberdayakan masyarakat?⁵

Mungkin saja fanatisme mengutip pembicaraan narasumber berawal dari prosedur baku yang harus ditempuh oleh para wartawan. Akan tetapi, secara konseptual para wartawan perlu memiliki daya kritis bahwa narasumber bisa saja tidak punya informasi yang akurat atau ingin mengendalikan informasi. Mereka juga harus sadar bahwa mereka membawa kehormatan dan citra media pers tempat mereka bekerja. Jangan sampai terjadi misalnya, gara-

⁴ Fanatisme mengutip pembicaraan narasumber bermakna teknik yang dipakai dalam mengumpulkan fakta hanya satu: wawancara dengan narasumber. Apa pun kata narasumber, dianggap sebagai fakta yang akurat. Jurnalisme yang menghasilkan seperti ini sering kali disebut "jurnalisme kutipan".

⁵ Sebuah kesalahan yang muncul akibat fanatisme mengutip narasumber bisa dilihat dalam berbagai berita tentang pesawat Adam Air yang hilang di awal tahun 2007 pada awal kejadian. Karena percaya begitu saja pada narasumber, berita yang disiarkan media pers menyesatkan masyarakat. Bagaimana persisnya kesesatan berita tersebut bisa dibaca lewat tulisan Farid Gaban dalam *Media Watch*, Edisi 2 Tahun 8, Februari 2007.

gara informasi yang disampaikan narasumber, citra media mereka jadi turun dan masyarakat enggan membaca media mereka.

Menghindari Pengaruh Birokrat atau Lembaga Bantuan

Tujuan utama jurnalisme, seperti ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar mereka bebas dan bisa mengatur diri mereka sendiri (2001:17). Ini menunjukkan bahwa tujuan jurnalisme sangat mulia. Ia membebaskan. Ia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri. Kalau ada sebuah media pers yang menjadikan masyarakat terperangkap dan tidak bisa mengatur diri mereka sendiri, maka media pers bersangkutan sudah gagal menggapai tujuan utama jurnalisme.

Dalam kaitannya dengan berita tentang bencana alam, apakah media pers sudah berhasil menggapai tujuan utama jurnalisme? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini secara spontan. Yang jelas, wartawan yang meliput bencana alam tak mungkin lupa memberitakan lembaga pemerintah dan lembaga bantuan yang sudah bekerja keras mengurangi beban penderitaan korban bencana alam. Ini terasa logis. Bukankah lembaga tersebut bekerja tanpa lelah membantu para korban? Akan tetapi, tidak berarti bahwa para wartawan harus mengikuti kehendak mereka dalam menyiarkan berita tentang mereka. Bagaimanapun wartawan media pers bukanlah karyawan mereka!

Ada sebuah berita tentang gempa Bantul yang disiarkan oleh ANTEVE. Berita tersebut sengaja memprofilkan sebuah lembaga bantuan dalam berita tentang gempa Bantul.⁶ Dalam berita itu, yang disoroti bukan bantuan apa saja yang diberikan dan tingkat kesesuaian bantuan dengan keinginan korban gempa, melainkan sosok lembaga, jumlah bantuan yang diberikan, pengurus lembaga dan prestasi lembaga. Dengan berita semacam itu, korban gempa menjadi pelengkap penderita saja. Sedangkan lembaga bantuan tersebut memperoleh publikasi gratis. Citranya jadi naik di mata masyarakat. Padahal di tempat lain, *holding company* dari lembaga tersebut sudah merusak alam Indonesia tanpa terperikan.

Ada lagi sebuah berita tentang gempa Bantul yang mempromosikan sebuah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu dianggap sebagai lembaga pertama yang memberikan bantuan kepada korban gempa Bantul. Lalu, dengan gagahnya sang kepala lembaga menyampaikan bahwa kalau bukan karena lembaganya, korban gempa Bantul akan lebih banyak lagi. Padahal siapa pun tahu bahwa yang memberikan pertolongan pertama pada korban gempa Bantul adalah para anak-anak muda yang tidak peduli dengan segala atribut yang menaungi mereka!

Dari kedua contoh berita ini, kita bisa mengerti bahwa ada pihak yang menggunakan kesempatan untuk menjadikan berita bencana alam sebagai ajang promosi mereka. Ada pihak yang sengaja mendesain berita agar mereka tampil bak pahlawan yang telah menolong korban. Kalau ini tidak diwaspadai media pers, bukan saja media pers diperalat, tetapi juga membuat

⁶ Waktu yang dipakai untuk menyiarkan profil lembaga tersebut lebih panjang daripada waktu yang dipakai untuk menyiarkan bantuan yang diberikan. Akibatnya, informasi tentang lembaga itulah yang lebih banyak diterima masyarakat.

masyarakat tidak bisa berpikir kreatif. Mereka merasa bahwa selalu ada lembaga yang bersedia menolong mereka kapan pun dan di mana pun. Padahal yang bisa menolong mereka setiap waktu adalah diri mereka sendiri!

Yang terakhir inilah yang seharusnya diperhatikan oleh media pers. Agar masyarakat bisa melihat bahwa mereka sebenarnya bisa berbuat sesuatu. Agar mereka bisa memusatkan perhatian pada kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan kalau mereka tidak berusaha keras menolong nasib mereka sendiri. Sepintas lalu, mungkin terlihat bahwa mereka dipaksa untuk bangkit. Tetapi, itu jauh lebih baik daripada membiarkan mereka terpuruk dengan mengharapkan bantuan saja.

Dalam konteks inilah barangkali wartawan perlu mengingatkan kembali korban bencana alam tentang makna bekerja. Para korban bencana alam harus kembali bekerja. Mereka harus menjadi manusia sewajarnya. Mereka harus bangkit dan bekerja sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Mereka tidak boleh dibiarkan dirundung kesedihan yang berkepanjangan. Lebih dari itu, mereka tidak boleh hanya mengharap bantuan saja. Dengan begitu, mereka kembali menjadi manusia yang utuh. Bagaimanapun bekerja adalah sebuah unsur kemanusiaan!

Secara praktis, pesan semacam ini harus disampaikan secara arif agar para korban tidak merasa makin menderita. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah melalui *framing* berita. Lewat *framing* berita, wartawan bisa menyampaikan pesan di atas tanpa harus menggurui para korban bencana alam. Persoalan yang kemudian muncul adalah, teknik framing apa yang cocok untuk kepentingan ini?

Sesungguhnya terdapat empat teknik yang bisa dipakai untuk memframing berita, yaitu: (i) *defining problem*; (ii) *diagnosing causes*; (iii) *making moral judgement*; dan (iv) *suggesting remedies* (Abrar, 2005:36). Kalau sebuah media pers menggunakan teknik *defining problem*, maka ia hanya memetakan dan mendefinisikan masalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku umum, mulai dari nilai material, sosial hingga kultural. Kalau sebuah media pers memilih teknik *diagnosing causes*, maka ia sedang berusaha mendiagnosis akar permasalahan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam menciptakan permasalahan. Kalau sebuah media pers menggunakan teknik *making moral judgement*, maka sesungguhnya ia memberikan penilaian moral terhadap permasalahan dan efek yang bakal lahir. Kalau sebuah media pers memakai teknik *suggesting remedies*, ia sebenarnya menawarkan solusi dengan menunjukkan apa yang harus dilakukan disertai dengan efek yang mungkin terjadi. Bertolak dari kenyataan ini, kita tentu sepakat bahwa teknik *framing* berita yang pas untuk menjadikan korban bencana alam makin berdaya adalah teknik *suggesting remedies*.

Berhati-hati Melemparkan Wacana

Sesungguhnya masyarakat bukan makhluk yang bodoh. Mereka tidak begitu saja menerima informasi yang dibawa media pers. Mereka menggunakan kategori-kategori sosial—yang mereka peroleh lewat klasifikasi, organisasi dan interpretasi pengalaman—yang mereka miliki dalam menyaring informasi. Dengan begitu, sebenarnya masyarakat paham informasi yang terbaik buat mereka.

Akan tetapi, media pers selalu ingin menciptakan wacana melalui berita yang mereka siarkan. Karena itu, mereka mem*framing* (membangkai) berita. Tujuan *framing*, seperti ditulis Ashadi Siregar, adalah untuk menghadirkan makna secara tersirat melalui berita yang berkonteks pada kepentingan publik (2003:xxx). Sayang masyarakat tidak begitu saja bisa menangkap makna yang tersirat ini. Mereka harus mengkonstruksikan makna itu terlebih dulu.

Secara praktis tidak semua masyarakat berhasil mengkonstruksikan wacana yang berkonteks pada kepentingan publik. Sekalipun mereka mengerti informasi yang terbaik buat mereka, tidak semuanya berhasil menangkap wacana yang dilemparkan media pers. Ini terasa logis. Bukankah media pers menjadikan dirinya sebagai medan pertarungan berbagai wacana yang sampai kepada masyarakat? Tidak heran bila tidak seluruh masyarakat bisa mengkonstruksikan wacana yang disampaikan media pers.

Kenyataan ini bisa dilihat, misalnya, melalui berita tentang sikap Mbah Maridjan yang tidak mau mengungsi sekalipun bahaya awan panas dan lava pijar sudah di depan matanya. Wacana yang ditangkap masyarakat dari berita itu adalah, Mbah Maridjan “keras kepala”. Padahal media pers ingin menyampaikan wacana: bagaimana seharusnya manusia membina persahabatan dengan alam!

Memang khalayak media pers tidak seragam. Meminjam pendapat Stuart Hall, paling tidak kita bisa mengklasifikasikan khalayak menjadi tiga kelompok, yaitu: (i) khalayak dominan; (ii) khalayak oposisi; dan (iii) khalayak yang bisa bernegosiasi (Dalam Masnia, 2006:10). Akan tetapi, kita harus mengakui bahwa khalayak media pers kita adalah khalayak dominan. Mereka cenderung mengikuti saja arus media pers. Mereka menerima begitu saja wacana yang disampaikan oleh media pers.

Bila dilihat secara saksama, kenyataan menunjukkan bahwa wacana tentang bencana alam yang sering ditangkap masyarakat adalah, bencana alam merupakan penyebab munculnya berbagai masalah. Padahal bisa saja bencana alam merupakan akibat dari sejumlah masalah! Wacana yang kedua ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, paling tidak, untuk menjadikan mereka waspada dalam menjalani kehidupan. Mereka tidak akan begitu saja mengeksploitasi alam untuk kepentingan mereka. Mereka takut menuai akibatnya kelak.

Tengoklah banjir misalnya. Memang banjir melahirkan berbagai masalah sosial. Namun, seperti ditulis Anton Wuisan, banjir merupakan sebuah akibat dari kebodohan ulah manusia (2002:58). Kalau masyarakat bisa menangkap wacana yang terakhir ini, tentu mereka tidak akan bersikap bodoh lagi. Mereka akan berusaha bertindak cerdas untuk mencegah terjadinya banjir. Kalau sudah begini, sebenarnya mereka bisa disebut diberdayakan oleh media pers.

Mengamati kenyataan selama ini, agaknya media pers belum mengharapkan masyarakat jadi pintar setelah memperoleh berita tentang bencana alam. Muncul kesan bahwa media pers hanya perlu membentuk simpati masyarakat terhadap bencana alam. Media pers seolah-olah tidak ingin menghubungkan bencana alam dengan kehidupan masyarakat berikutnya. Media pers seakan-akan tidak ingin memfasilitasi masyarakat menjadi waspada terhadap bencana alam di masa mendatang.

Menjelaskan Risiko Pasca Bencana Alam

Berita bencana alam biasanya berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Wajar bila media pers berusaha melaporkan risiko yang bakal diterima masyarakat. Ini sudah sesuai dengan penjelasan yang diberikan Michael Keating di atas. Persoalannya adalah, risiko seperti apa yang harus diberitakan media pers?

Dalam kaitan ini, yang penting sebenarnya adalah manajemen risiko. Artinya, media pers perlu menyajikan fakta yang bisa membantu masyarakat mengelola risiko yang bakal mereka hadapi. Fakta ini tentu saja diperoleh dari berbagai narasumber. Persoalannya adalah, tidak mudah bagi media pers mencari narasumber yang mengerti keadaan korban bencana alam dan memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Walaupun demikian, media pers harus tetap menyiarkan berita bencana alam secara cepat. Lewat berita itu masyarakat harus diberitahu bagaimana mengelola risiko yang bakal mereka hadapi. Melalui berita itu masyarakat diharapkan memupuskan keraguan tentang apa yang harus dilakukan setelah ditimpa bencana alam. Maka, persoalan empati narasumber terhadap korban kadang-kadang terabaikan. Lebih dari itu, akurasi terhadap fakta yang disampaikan kadang-kadang juga terabaikan. Itulah sebabnya ada media pers yang terpaksa harus meralat berita yang telah mereka siarkan pada waktu sebelumnya.

Memang tidak salah meralat berita yang telah disiarkan media pers. Bahkan tindakan itu merupakan tindakan terpuji. Akan tetapi, masyarakat sudah terlanjur cemas. Ada di antara mereka bahkan sudah sampai pada tingkat depresi yang berkepanjangan. Maka, media pers, tanpa sengaja, sudah menghadirkan teror dalam kehidupan masyarakat. Media pers tidak membantu masyarakat mengelola risiko yang mereka hadapi pasca bencana alam.

Risiko yang dihadapi masyarakat pasca bencana alam tentu tergantung dari seberapa parah bencana alam yang menimpa mereka. Risiko itu bisa saja berkembang dari waktu ke waktu. Dari semua risiko itu, tentu ada yang bisa diprediksi oleh media pers melalui nara sumbernya. Adalah kewajiban media pers untuk menjelaskan risiko ini kepada masyarakat.

Memang sebagian khalayak sudah tergolong masyarakat swainformasi. Artinya, mereka bisa mencari informasi sendiri lewat internet misalnya. Lewat internet, mereka bisa memperoleh berbagai informasi tentang bencana alam, mulai dari apa yang akan terjadi, bagaimana menyelamatkan diri hingga akibat yang ditimbulkan bencana alam. Tetapi, jumlah khalayak yang tergolong swainformasi ini tidak banyak. Yang terbanyak adalah khalayak pasif, yang menerima diri mereka sebagai obyek informasi.

Dalam pada itu, sikap media pers yang tidak bersedia menjelaskan risiko bencana alam kepada masyarakat tergolong melanggar esensi kedelapan jurnalisme versi Bill Kovach dan Tom Rosentstiel. Sebab, menurut kedua penulis ini, esensi kedelapan jurnalisme adalah, wartawan harus menyiarkan berita yang proporsional dan komprehensif (2001:164). Komprehensif di sini berarti menyeluruh. Dalam konteks berita bencana alam, komprehensif hendaklah mengandung unsur risiko bencana alam. Kalau unsur risiko itu tidak disiarkan sebuah media pers, maka media pers bersangkutan bisa disebut sudah mencederai jurnalisme.

Dari sisi masyarakat, berita tentang bencana alam yang tidak komprehensif tidak akan informasi yang cukup. Sikap yang dibuat bertolak dari informasi yang tidak cukup akan melahirkan sikap yang blunder. Yang namanya sikap blubber selalu tidak mendatangkan kebaikan.

Membantu Memaknai Rasa Takut Dengan Benar

Bencana alam di Indonesia belakangan ini, terutama tsunami di Aceh, gempa bumi di Bantul, gempa bumi di Sumatra Barat, telah menimbulkan rasa takut yang mendalam dalam pikiran masyarakat. Dari rasa takut itu muncul hikmah: apa pun manusia hanya makhluk dan hanya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Berkehendak. Akan tetapi, berapa pun besarnya bencana alam yang menimpa manusia, tidak sedikit pun ia mencederai keagungan Allah.

Agaknya sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadikan ketakutan sebagai sumber kehidupan. Karena ketakutan itulah masyarakat mencari perlindungan. Ketakutanlah yang menjadikan masyarakat mencari gantungan. Ketakutanlah yang membuat masyarakat mencoba merajut sketsa harapan, serumit apa pun usaha itu. Maka, sudah selayaknya masyarakat mengelola rasa takut itu dengan benar.

Para korban bencana alam, yang mengalami langsung peristiwa mengerikan itu, punya cara sendiri untuk memaknai dan mengelola ketakutan. Mereka tahu persis bahwa hanya dengan bergantung dan menyerahkan diri kepada Allah sepanjang hiduplah mereka bisa bertahan. Akan tetapi, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengalami langsung bencana alam. Mampukah mereka mengelola rasa takut dengan benar? Media pers bisa berperan membantu masyarakat untuk mengelola rasa takut ini dengan benar.

Cara yang bisa dilakukan media pers adalah, mengajak mereka terlibat dalam berita yang disiarkan. Media pers menempatkan masyarakat sebagai subyek, bukan obyek semata. Media pers tidak hanya mengkondisikan masyarakat mengunyah-ngujah “petuah” yang disampaikan narasumber. Sebaliknya, media pers harus memberikan kesempatan kepada masyarakat bicara perkara apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka harapkan. Semua kondisi ini, kemudian, disampaikan media pers kepada narasumber untuk ditanggapi. Tanggapan narasumber inilah yang kelak perlu disiarkan media pers kepada masyarakat.

Penyiaran sikap dan pendapat masyarakat melalui berita, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, merupakan sebuah kewajiban. Sebab, mereka menganggap bahwa berita adalah sebuah forum untuk menampung kritik dan komentar masyarakat. Ini bahkan mereka anggap sebagai esensi keenam jurnalisme (2001:12). Dengan kata lain, wartawan yang menyiarkan kritik dan komentar masyarakat bisa dianggap sebagai wartawan yang sudah menjalankan esensi keenam jurnalisme.

Kalau sebuah media pers sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat korban bencana alam terlibat dalam berita, sebenarnya ia sudah mempraktekkan jurnalisme publik.⁷ Sebab, jurnalisme publik, seperti ditulis Bob Franklin dkk, adalah jurnalisme yang memberikan kesempatan kepada masyarakat bukan hanya untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (2005:214). Ini memperlihatkan bahwa jurnalisme publik perlu menjadi salah satu acuan bagi media pers dalam menyiarkan berita tentang bencana alam.

⁷ Jurnalisme publik sering kali dipertukarkan dengan jurnalisme kewarganegaraan (*civic journalism*), tetapi, banyak ahli yang lebih suka menyebutnya sebagai jurnalisme publik.

Jurnalisme publik, tambah Bob Franklin dkk, hanya bisa dipraktekkan bila tersedia ruang publik (*public sphere*) (2005:214). Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia sudah menyediakan ruang publik untuk beroperasinya jurnalisme publik? Melihat kondisi kehidupan pers sekarang, sesungguhnya *public sphere* sudah ditebarkan oleh media pers. Sebuah contoh adalah berita tentang kekerasan di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) yang menewaskan madya praja Cliff Muntu. Berita tersebut dilengkapi dengan berita yang relevan dengan kemungkinan penyebab kematian Cliff: kekerasan yang terjadi di IPDN ketika bernama STPDN (Sekolah Pendidikan Tinggi Dalam Negeri). Hampir semua stasion televisi menayangkan adegan kekerasan yang terjadi di STPDN. Penayangan adegan tersebut berlangsung beberapa kali. Tidak heran bila masyarakat mulai memperhatikan kekerasan di IPDN.

Dalam waktu sekejap, perhatian masyarakat terhadap kekerasan di IPDN berubah menjadi sebuah isu. Pihak-pihak yang punya kepentingan dengan isu ini mulai angkat bicara. Mereka menyampaikan pendapatnya kepada media pers. Mereka juga memberikan penilaian moral mereka kepada media pers. Apa yang terjadi kemudian adalah, semacam diskusi di media pers tentang kekerasan di IPDN. Setiap media pers tentu memuat berita tentang diskusi tersebut.

Mungkin media pers tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi dengan diskusi tersebut. Akan tetapi, menurut Ilmu Komunikasi, yang sebenarnya terjadi adalah, media pers telah menciptakan *public sphere* tentang kekerasan di IPDN. Ini bisa dilihat dari kenyataan: (i) ada informasi dan diskusi tentang kekerasan di IPDN; (ii) diskusi tentang kekerasan di IPDN berlangsung secara terbuka, tanpa tekanan; (iii) semua pihak bebas menyampaikan idenya tentang kekerasan di IPDN; dan (iv) diskusi bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang masalah yang terjadi di IPDN dan mendorong terjadinya perbaikan. Semua ini sesuai dengan konsep *public sphere* yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas.⁸

Kendati begitu, kenyataan menunjukkan bahwa media pers belum memanfaatkan kebebasannya membentuk *public sphere* untuk penyiaran berita tentang bencana alam. Media pers belum menyiapkan mekanisme redaksional yang menjamin masyarakat bisa memaknai rasa takut akibat bencana alam secara benar. Sekalipun media pers sudah memberitakan bencana alam secara habis-habisan, tetap saja yang ditangkap oleh masyarakat bahwa media pers menyiarkan berita seperti biasa (*as usual*). Masyarakat menganggap media pers menyiarkan berita tentang bencana alam seperti peristiwa harian rutin. Padahal peristiwa tersebut, di samping menimbulkan duka, juga meninggalkan ketakutan yang hebat!

Penutup

Tidaklah sulit bagi kita untuk memahami bahwa uraian di atas merupakan hasil dari telaah pustaka terhadap buku-buku tentang jurnalisme. Telaah tersebut bukan diorientasikan kepada mengkritisi norma-norma jurnalisme yang universal, tetapi kepada bagaimana memberdayakan masyarakat lewat berita tentang bencana alam. Hasilnya bisa diusulkan

⁸ Bagaimana persisnya media pers Indonesia membentuk *public sphere* bisa dibaca dalam artikel berjudul "Public Sphere dan Media Massa di Indonesia Pada Era Orba dan Reformasi" yang ditulis oleh Embu Henriquez dalam *Respons*, Jurnal Etika Sosial, Volume 7, Nomor 01, Juli 2002.

kepada media pers. Tegasnya, wartawan yang meliput berita tentang bencana alam bisa mempraktekkan petuah yang diperoleh lewat telaah pustaka ini. Adapun petuahnya meliputi: (i) mendorong masyarakat berpikir kreatif; (ii) menghindari “pejabat pembuat berita”; (iii) menghindari pengaruh birokrat atau lembaga bantuan; (iv) berhati-hati melemparkan wacana; (v) menjelaskan risiko pasca bencana alam; dan (vi) membantu memaknai rasa takut dengan benar.

Semua petuah di atas penulis peroleh, setelah membaca, terutama empat buku, yaitu: (i) *Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, third edition*; (ii) *Covering the Environment: A Handbook on Environmental Journalism*; (iii) *Key Concepts in Journalism Studies*; dan (iv) *The Elements of Journalism*. Petuah-petuah tersebut mungkin terasa klise. Tetapi, semuanya bisa dipraktekkan. Lalu, apakah praktek tersebut kelak bisa melahirkan babak baru praktek jurnalisme tentang bencana alam di Indonesia?

Tentu saja bisa. Maka diperlukan penjabaran yang lebih operasional tentang bagaimana mempraktekkannya. Bagaimana menjabarkan secara operasional sendiri bisa ditulis dalam sebuah modul tentang bagaimana menulis berita tentang bencana alam yang memberdayakan khalayak. Sayang, ruang yang tersedia tidak cukup untuk itu. Maka, biarlah pada kesempatan lain kita mewujudkan modul yang dimaksud.*****

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadhya. (2005). *Penulisan Berita, edisi kedua*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Franklin, Bob, Hamer, Martin, Hanna, Mark, Kinsey, Marie and Richardson, John E. (2005). *Key Concepts in Journalism Studies*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Hartley, John. (2002). *Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, third edition*. London and New York: Routledge.
- Ida, Rachmah. (2007). ‘Authoriphobia Media Indonesia.’ *Media Watch*, Edisi 1, Tahun 8, Januari 2007. Surabaya: Lembaga Konsumen Media.
- Masnia. (2006). ‘Televisi Kita Masih Mesra Dengan Kekerasan.’ *Media Watch*, Edisi 28 Desember 2006. Surabaya: Lembaga Konsumen Media.
- Mohd, Ainon dan Hassan, Abdullah. (2005). *Belajar Berfikir*. Bentong, Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn, Hhd.
- Keating, Michael. (1993). *Covering the Environment: A Handbook on Environmental Journalism*. Ottawa: National Round Table on the Environment and the Economy.
- Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. (2001). *The Elements of Journalism*. New York: Three Rivers Press.
- Siregar, Ashadi. (2002). ‘Pengantar.’ Dalam Tim Redaksi LP3ES, *Politik Redaksional Media Indonesia: Analisis Tajuk Rencana 1998-2001*. Jakarta: LP3ES.
- Sumardjo, Jakob. (1997). *Orang Baik Sulit Dicari*. Bandung: Penerbit ITB.
- Veronica. (2006). ‘Politik Jurnalisme, Bukan Political Virgin.’ *Repons, Jurnal Etika Sosial*, Volume 11 Nomor 1, Juli 2006. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Wuisan, Anton. (2002). 'Bencana Banjir dan Integritas Moral Pejabat.' *Respons, Jurnal Etika Sosial*, Volume 7, Nomor 1, Juli 2002. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.